

Pengembangan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Digital Di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato

Zuchri Abdussamad¹, Arifin Tahir²

¹Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

email: zuchriabdussamad@ung.ac.id

²Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

arifin_tahir@ung.ac.id

Abstract

Digital systems with their various programs, such as websites, SMS Centres/Call Centres, e-papers, One-Stop Integrated Services (PTSP), e-ktip, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-warehouse can encourage increased transparency of village budget management, encourage the formation of compliance with the law and strengthen legal certainty for village government officials in carrying out their duties. By implementing digital systems, work effectiveness and efficiency will increase. Digital systems that provide transparency can ultimately encourage an increase in the responsiveness of village government administrators and the community as the owner of sovereignty is also given the same space in obtaining services from village government officials. In Molosipat Village, West Popayato District, Pohuwato Regency, in carrying out administrative services, they still use conventional or manual methods so they are still less effective and efficient. The community often experiences difficulties when submitting letters that are limited by space and time, such as the community being required to go to the village office and can only be submitted during working hours. In addition, letter administration archives require a large storage capacity and are prone to physical file damage. Through the MBKM integrated KKN program in Molosipat Village in 2023, it aims to implement the digitalization of web-based administrative services to facilitate the community in accessing information and obtaining services in Molosipat Village. In addition, assistance in the use of the system is also provided to village government officials with training activities that include exposure and practice of system functionality.

Keywords: Digitalisation; Public Services; MBKM Integrated KKN.

Abstrak

Sistem digital dengan berbagai programnya, seperti website, SMS Center/Call Center, e-paper, pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), e-ktip, e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-warehouse mampu mendorong peningkatan transparansi pengelolaan anggaran desa, mendorong terbentuknya ketaatan terhadap hukum dan penguatan kepastian terhadap hukum bagi para penyelenggara pemerintahan desa dalam melaksanakan tugasnya. Dengan menerapkan sistem digital, efektifitas dan efisiensi kerja akan semakin meningkat. Sistem digital yang memberikan transparansi pada akhirnya dapat mendorong peningkatan sikap responsif para penyelenggara pemerintahan desa serta Masyarakat sebagai pemilik kedaulatan juga diberikan ruang yang sama dalam memperoleh layanan dari aparat pemerintah desa. Di Desa

Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato dalam melaksanakan pelayanan administrasi masih menggunakan cara konvensional atau manual sehingga masih kurang efektif dan efisien. Masyarakat sering mengalami kesulitan ketika melakukan pengajuan surat yang terbatas oleh ruang dan waktu, seperti halnya Masyarakat diharuskan ke ke kantor desa serta hanya dapat di ajukan pada jam kerja. Selain itu, arsip administrasi surat yang memerlukan kapasitas penyimpanan yang besar serta rawan terhadap kerusakan berkas secara fisik. Melalui program KKN terintegrasi MBKM di Desa Molosipat Tahun 2023 bertujuan menerapkan digitalisasi pelayanan administrasi berbasis web untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan memperoleh pelayanan di Desa Molosipat. Selain itu, dilakukan juga pendampingan penggunaan sistem kepada aparatur pemerintah desa dengan kegiatan pelatihan yang mencakup pemaparan dan praktik fungsionalitas sistem.

Kata Kunci: Digitalisasi; Pelayanan Publik; KKN Terintegrasi MBKM.

© 2024 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

Correspondence author: Zuchri Abdussamad, zuchriabdussamad@ung.ac.id, Gorontalo, Indonesia

PENDAHULUAN

Desa sebagai salah satu entitas pemerintahan juga memiliki peran yang sama dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yakni pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan. Dalam menjalankan fungsi tersebut tentunya desa dibekali dengan sejumlah peraturan sebagai pedoman dalam menyelenggarakan urusan ke pemerintahan. Selain itu, desa juga mendapatkan pendanaan yang bersumber baik dari pemerintah, maupun pemerintah daerah, serta sumber lainnya. Pada umumnya penyelenggaraan pemerintahan desa masih terkendala banyak hal, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana, serta sumber pembiayaan. Diperlukan keterlibatan para pihak baik institusi supra desa maupun lembaga lain dalam mendorong kemajuan di desa (Ikhbaluddin,2021).

Perkembangan teknologi yang semakin maju mengharuskan setiap instansi untuk berbenah dalam berbagai hal, khususnya yang berkaitan

dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi mengakibatkan prosedur pelayanan menggunakan sistem manual sudah tidak efisien lagi baik dari segi waktu maupun tenaga. Penggunaan sistem informasi dalam administrasi maupun pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi publik diharapkan dapat membantu mempercepat pekerjaan, pelayanan, pemrosesan dan pengolahan data, serta menambah efisiensi dalam pelayanan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Namun keberhasilan penerapan teknologi informasi pada sebuah sistem tidak terlepas dari peran sumber daya manusia (Rihardi, 2019).

Pembangunan model pelayanan publik desa sejalan dengan meningkatnya kewenangan Pemerintahan Desa sebagaimana diamanatkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satu hal yang sangat krusial adalah terkait dengan penguatan kapasitas pelayanan publik pemerintahan desa. Dalam perspektif pelayanan publik desa, perlu disusun model pelayanan publik desa sesuai dengan kewenangannya. Membangun konstruksi model pelayanan publik desa tidak harus dimulai dari mengidentifikasi aspek aspek yang berkaitan dengan manajemen pelayanan publik desa secara menyeluruh (Marsono, 2017).

Desa Molosipat merupakan salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato. Potensi utama Desa Molosipat adalah dari sektor perikanan dan kelautan serta perkebunan, karena sebagian besar wilayah Desa Molosipat adalah berupa laut dan juga perkebunan yang berada di dataran dan juga perbukitan.

Bertolak dari permasalahan tersebut kami dari staf pengajar Jurusan Administrasi publik Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri

Gorontalo mencoba memformulasikannya ke dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) terintegrasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) PMD MOMONGU KAMBUNGU.

Program Kuliah Kerja Nyata MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kegiatan sejenis pengabdian kepada masyarakat yang akan menurunkan mahasiswa dalam kehidupan masyarakat sebagai proses belajar timbal balik. Melalui program KKN-MBKM PMD Momongu Kambungu ini kami staf pengajar mencoba melakukan transfer ilmu dan teknologi kepada aparat desa dan masyarakat secara langsung. Mahasiswa sejumlah 15 - 25 orang akan hidup berdampingan dengan penduduk secara bersama-sama melakukan kegiatan dalam rangka penyelesaian masalah yang dihadapi selama ini. Transfer ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut akan melibatkan staf dosen – mahasiswa – masyarakat.

Program lintas prodi ini akan memberi kesempatan bagi mahasiswa meningkatkan kompetensi sesuai kebutuhan yang tergambar pada capaian pembelajaran, tanpa meningkatkan core kompetensi pada program studi asalnya. KKN – MBKM PMD Momongu Kambungu akan memberi dampak positif bagi mahasiswa karena terbiasa hidup adaptif dalam merespon masalah yang terjadi di masyarakat dan memberi solusi sesuai dengan kapasitas ke ilmuannya.

Mitra dalam program pengabdian ini adalah aparat desa serta masyarakat desa Molosifat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini fokus kegiatan yang dipilih adalah “Pengembangan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Desa Berbasis Digital Di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato”.

Internet kini telah menjadi salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia. Dengan koneksi internet yang stabil dan cepat kita dapat melakukan berbagai macam kegiatan seperti berkerja, belajar, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Namun tidak semua daerah memiliki akses internet yang memadai, terutama di desa-desa yang jauh dari pusat kota.

Sangat banyak aspek kehidupan kita dan hamper semua yang kita lakukan bergantung pada energi, khususnya suplai energi Listrik. Pemadaman Listrik bergilir merupakan kendala bagi mahasiswa dalam menjalankan aktifitas. Permasalahan yang masih dihadapi masyarakat di desa molosifat adalah sebagai berikut:

1. Jaringan Internet Keterbatasan jaringan internet kurang memadai.
2. Listrik Pemadaman bergilir 1-2 hari membuat kendala bagi mahasiswa dalam menjalankan aktifitas.

METODE PELAKSANAAN

Sebelum kegiatan dilaksanakan tim melakukan observasi dan pemantauan terhadap kegiatan pelayanan publik pada pemerintah desa molosifat kecamatan popayato. Kegiatan ini dilakukan bersama mahasiswa yang diikutkan sebagai anggota tim pelaksana, dimana mahasiswa disebar pada tiga dusun yang ada. Dari hasil observasi inilah maka tim menyusun tahapan yang perlu dilakukan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat, sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat di desa molosifat kecamatan popayato kabupaten Pohuwato.

Pengenalan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan tonggak penting dalam evolusi birokrasi menuju tata kelola yang lebih efisien dan transparan. Adopsi teknologi ini adalah langkah krusial dalam menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih baik, akses yang mudah, dan pemerintahan yang lebih responsif. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi sistem ini bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai, perlindungan data pribadi yang kuat, serta kesadaran akan tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju pemerintahan berbasis elektronik yang sukses.

Pelayanan publik digital sejatinya harus digalakkan sedini mungkin. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal, pemerintah mengharapkan adanya peningkatan peran aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Di era digital sekarang ini, kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi semakin tinggi. Oleh sebab itu pemerintah harus benar-benar mengupayakan pelayanan yang maksimal supaya menghasilkan pelayanan publik yang efisien baik dari segi biaya, waktu dan tenaga.

Pemerintah dalam hal ini harus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik digital. Selain karena sudah menjadi kebutuhan yang mendesak, juga akan memberikan banyak manfaat bagi pemerintah dan masyarakat. Keuntungan yang didapat pemerintah diantaranya adalah efisiensi biaya dan waktu sehingga pelayanan dengan menggunakan kertas akan berkurang. Selain itu pelayanan terhadap masyarakat juga menjadi lebih cepat. Manfaat lainnya yaitu meningkatnya produktivitas pekerja dan pengguna layanan. Pelayanan publik digital juga dapat menjadi media promosi pemerintah terutama

untuk sosialisasi kinerja dan program pemerintah. Apabila masyarakat merasa puas dengan kinerja pelayanan publik otomatis hal ini akan mengembalikan trust society kepadapemerintah.

Maka dari itu kami mahasiswa kkn mbkm ung melahirkan satu inovasi untuk pengembangan pelayanan administrasi yang berbasis digital. kami berinovasi untuk mengubah sistem pelayanan yang lebih efektif dan transparan lagi.

Perkembangan teknologi yang semakin maju mengharuskan setiap instansi untuk berbenah dalam berbagai hal, khususnya yang berkaitan dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Semakin tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi mengakibatkan prosedur pelayanan menggunakan sistem manual sudah tidak efisien lagi baik dari segi waktu maupun tenaga. Penggunaan sistem informasi dalam administrasi maupun pelayanan yang diselenggarakan oleh instansi publik diharapkan dapat membantu mempercepat pekerjaan, pelayanan, pemrosesan dan pengolahan data, serta menambah efisiensi dalam pelayanan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Namun keberhasilan penerapan teknologi informasi pada sebuah sistem tidak terlepas dari peran sumber daya manusia. Untuk mengukur kinerja dalam program kegiatan, maka di lakukan monitoring evaluasi dalam menentukan keberlanjutan program yang diuraikan pada Tabel 1.

Tabel 1
Indikator Keberhasilan Program KKN MBKM Tahun 2023

No	Program	Waktu Monev	Indikator keberhasilan yang akan diukur	Catatan perkembangan kegiatan	Status hasil akhir pemantauan dan keterangan
1	Sosialisasi program pelayanan administrasi berbasis digital	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Terbentuknya tim sosialisasi untuk memaparkan pentingnya pelayanan administrasi berbasis digital. 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tim sosialisasi untuk memaparkan pentingnya pelayanan administrasi berbasis digital. 	Sosialisasi program
2	Pembuatan website desa sebagai akses dalam menunjang penerapan pelayanan administrasi pemerintah desa berbasis digital.	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Persiapan penyusunan pembentukan tim pengelola website • Observasi dan identifikasi informasi dan model pelayanan yang akan di jadikan fitur di dalam layanan website 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya tim pengelola website yang terdiri dari mahasiswa dan aparat desa. • Fitur-fitur layanan informasi dan pelayanan administrasi telah di buat 	<ul style="list-style-type: none"> • Website pelayanan administrasi dan informasi berbasis digital telah di buat, dan fitur-fitur layanannya telah rampung. Website ini diberi nama SIPADI Molosifat.
3	Simulasi penginputan data melalui pelayanan administrasi desa berbasis digital	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Proses menginput data yang diperlukan dalam pelayanan administrasi desa • Proses mencari data yang berkaitan dengan website desa • Proses penyempurnaan website untuk pemberian layanan berbasis 	Semua proses penginputan dan perampungan data kedalam website telah selesai	Semua data yang di perlukan dalam layanan website telah di masukan ke dalam website.

			digital
			<ul style="list-style-type: none"> • Proses perampungan semua data yang diperlukan.
4	Praktek pelayanan administrasi pemerintahan desa berbasis digital	2023	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pelatihan penginputan data administrasi desa • Praktek pelayanan administrasi berbasis digitalisasi • Proses Demosntrasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berikut rincian persiapan dan pelaksanaan kegiatan KKN Terintegrasi MBKM Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato :

1. Perencanaan program sosialisasi dan pelatihan, meliputi rencana kegiatan, peserta, tenaga instruktur, dan rencana anggaranKegiatan sosialisasi.
2. Kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk pemaparan, dimana penyaji akan memberikan materi dalam bentuk diskusi serta Tanya jawab. Dalam kegiatan ini semua materi yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan masyarakat melalui cakupan administrasi digital jangka panjang yang dipersiapkan dalam bentuk slide persentasi.
3. Kegiatan Pelatihan. Kegiatan sosialisasi yang diberikan tidak maksimal jikatidak dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan. Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode pelatihan,

yaitu melalui pelatihan instruksional tahapan-tahapan yang terencana. Modul ini diberikan kepada peserta sebagai pedoman dalam pembentukan pelayanan kesehatan masyarakat melalui cakupan administrasi digital jangka panjang. Peserta pelatihan mempunyai pilihan untuk mengikuti

Modul yang sudah diberikan, atau dapat mengembangkan kreativitas masyarakat itu sendiri. Instruksi Kegiatan Pelatihan. Kegiatan sosialisasi yang diberikan tidak maksimal jika tidak dilanjutkan dengan kegiatan pelatihan. Program pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode pelatihan, yaitu melalui pelatihan instruksional tahapan-tahapan yang terencana. Modul ini diberikan kepada peserta sebagai pedoman dalam pembentukan pelayanan kesehatan masyarakat melalui cakupan administrasi digital jangka panjang. Peserta pelatihan mempunyai pilihan untuk mengikuti modul yang sudah diberikan, atau dapat mengembangkan kreativitas masyarakat itu sendiri.

1. Metode tersebut dilakukan untuk menunjukkan proses kerja pendampingan masalah yang dihadapi di desa menjadi bahan yang berguna efisien dan bernilai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat secara mendasar.
2. Kesempatan tanya jawab diberikan kepada masyarakat selama proses pelatihan. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan dalam mengatasi beberapa kendala yang kurang dimengerti oleh masyarakat.
3. Pelaporan program meliputi evaluasi kegiatan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program pelatihan ini.

4. Pelaporan program meliputi evaluasi kegiatan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, serta hal-hal yang mendukung atau menghambat pelaksanaan program pelatihan ini.

Program yang dilakukan oleh mahasiswa dihitung dalam volume 144 Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM) dalam sebulan. Rata-rata jam kerja efektif mahasiswa (JKEM) per hari adalah 4,8 sebagai acuan. Uraian tabel dalam bentuk program dan jumlah mahasiswa pelaksanaannya adalah:

Tabel 2.
Uraian Pekerjaan, Program dan Volumennya dalam 4 bulan (120 hari)

No	Program	Kegiatan	Volume (JKEM)	Keterangan
1	Sosialisasi Program KKN-MBKM mandiri membangun desa “proyek desa” dengan pemerintah desa berbasis digital	<ul style="list-style-type: none"> • Studi pustaka/searching materi Sosialisasi • Penyusunan materi sosialisasi Pembuatan Undangan dan distribusi • Penyiapan tempat sosialisasi 	16	Peserta KKN
2	Praktek penyusunan rencana aksi Layanan Administrasi Berbasis Digital	<ul style="list-style-type: none"> • Studi pustaka/ searching materi Sosialisasi • Penyusunan materi sosialisasi dan penyusunan AD • Undangan Penyiapan tempat sosialisasi distribusi 	16	Peserta KKN
3	Pembuatan website sebagai desa akses	Persiapan penyusunan pembentukan tim pengelola website	24	Peserta KKN



Gambar 1. Kedatangan Mahasiswa di Lokasi KKN

Pembahasan

Sosialisasi dan Pelatihan Penggunaan Website Desa

Dalam menjalankan program inti, yakni pengembangan tata kelola pelayanan administrasi desa berbasis digital di desa molosifat kecamatan popayato barat kabupaten pohuwato, kami tim kkn harus terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi.

Dalam era digital yang semakin berkembang, penerapan teknologi telah merambah hampir semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik adalah langkah revolusioner dalam transformasi birokrasi tradisional menuju ke efisiensi, transparansi, dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat. Dalam artikel ini, penulis akan mengupas apa itu sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta alasan mengapa adopsi teknologi ini menjadi penting bagi kemajuan birokrasi.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik, juga dikenal sebagai e-government atau pemerintahan elektronik, merujuk pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan publik, memfasilitasi interaksi antara pemerintah dan warga, serta mengelola berbagai proses administratif dengan lebih efisien. Teknologi ini mencakup berbagai aplikasi seperti situs laman pemerintah, platform

e-procurement, sistem manajemen data penduduk, layanan secara daring, dan masih banyak lagi.

Pengenalan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan tonggak penting dalam evolusi birokrasi menuju tata kelola yang lebih efisien dan transparan. Adopsi teknologi ini adalah langkah krusial dalam menjawab tuntutan masyarakat akan layanan yang lebih baik, akses yang mudah, dan pemerintahan yang lebih responsif. Namun, perlu diingat bahwa keberhasilan implementasi sistem ini bergantung pada infrastruktur teknologi yang memadai, perlindungan data pribadi yang kuat, serta kesadaran akan tantangan-tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan menuju pemerintahan berbasis elektronik yang sukses.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan kegiatan inti dapat diketahui bahwa peserta sosialisasi menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap materisozialisasi yang diberikan. Antusiasme ini dapat dilihat dari berbagai pertanyaan yang diberikan kepada Pemateri/ Narasumber dalam kegiatan diskusi dan sharing pengalaman terkait pengembangan pelayanan administrasi berbasis digital Kegiatan Pendukung.



Gambar 2. Sosialisasi & Pelatihan Penggunaan Website Desa

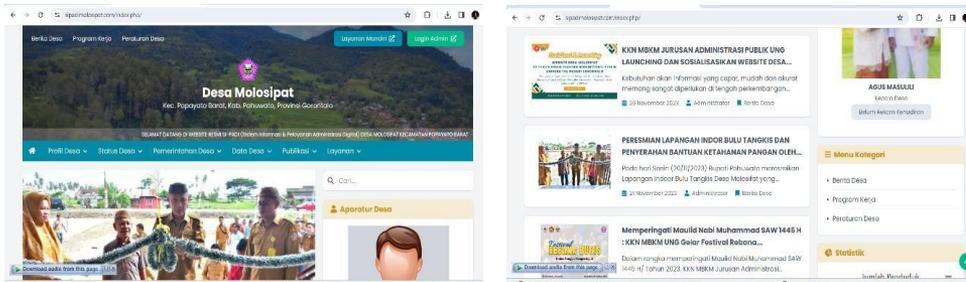
Adapun luaran dari program yang dirancang oleh mahasiswa KKN MBKM di Desa Molosipat yakni berupa website desa yang kemudian akan menjadi pusat informasi dan pelayanan administrasi digital di Desa

Molosipat. Website ini diberi nama SI-PADI Desa Molosipat (Sistem Informasi dan Pelayanan Administrasi Digital Desa Molosipat).

Penamaan website desa ini menjadi Si-Padi memiliki makna filosofis yakni Desa Molosipat yang sebagian besar merupakan petani sawah dan luasnya hamparan sawah yang indah yang akan ditemui Ketika berkunjung ke Desa Molosifat.

Mahasiswa KKN MBKM 2023 telah menguji coba website tersebut dan telah melakukan pelatihan terhadap aparaturnya pemerintah desa dan masyarakat terkait penggunaan secara teknis dari website tersebut. Di dalam website telah di muat beberapa berita, mulai dari publikasi kegiatan- kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa KKN itu sendiri sampai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Molosipat. Hal itu dapat di akses pada link sebagai berikut:

- 1) <https://sipadimolosipat.com/>
- 2) <https://sipadimolosipat.com/index.php/artikel/2023/11/18/kkn-mbkm-jurusan-administrasi-publik-ung-di-desa-molosipat-adakan-turnamen-olahraga-dalam-rangka-memperingati-hari-olahraga-nasional>
- 3) <https://sipadimolosipat.com/index.php/artikel/2023/11/20/memperingati-maulid-nabi-muhammad-saw-1445-h-kkn-mbkm-ung-gelar-festival-rebana-bugis-di-desa-molosifat>
- 4) <https://sipadimolosipat.com/index.php/artikel/2023/11/26/kkn-mbkm-jurusan-administrasi-publik-ung-launching-dan-sosialisasikan-website-desa-molosifat-guna-mendukung-informasi-dan-pelayanan-publik>



Gambar 3. Tampilan Wesite Si-Padi Desa Molosipat

Pelaksanaan Kegiatan Tambahan

1. Tournament Mini Soccer

Mahasiswa Peserta KKN MBKM Periode I UNG Tahun 2023 membuat sebuah tournament Mini Soccer. Unsur yang terlibat pelaksanaan KKN MBKM KADES CUP 2023 adalah Mahasiswa KKN MBKM, Karang Taruna dan Aparat Desa. Tournament ini

Dilaksanakan bukan hanya untuk mencari juara tetapi menjadi ajang untuk mempererat silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan masyarakat Molosipat.



Gambar 4. Kegiatan Turnamen Mini Soccer

2. Jumat Bersih

Jumat bersih yang merupakan program kerja rutin dilaksanakan pada hari jumat setiap minggu yang melibatkan masyarakat dan mahasiswa kkn. Program ini dilaksanakan untuk mebiasakan seluruh masyarakat desa molosifat berbudaya hidup bersih dan sehat.



Gambar 5. Kegiatan Jumat Bersih Bersama Polsek Popayato Barat

KESIMPULAN

Pada kegiatan KKN Terintegrasi dengan MBKM di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Tahun 2023 ini semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Selain itu masyarakat Desa Molosipat dan Karang Taruna sangat terbuka dan mendukung penuh kegiatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM), Universitas Negeri Gorontalo atas dukungan Dana Pengabdian PNPB Tahun 2023

REFERENCES

- Ikhbaluddin. (2021). Pelayanan Publik Berbasis Online Di Desa (Studi Pada Empat Desa Di Kecamatan Jatinangor). *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, Vol. 3(2).
- Rihardi, Satrio Ageng, Arnanda, Yusliwidaka, & Sukron, Mazid. (2019). Efektivitas Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik Dengan Sikdes (Sistem Informasi Konektivitas Desa) (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang). *Journal of Public Administration and Local Governance*, Vol. 3(1): 70- 81.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNG. (2022). *Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat*. Gorontalo. LPPM Universitas Negeri Gorontalo
- Marsono. (2017). Membangun Model Pelayanan Publik Desa: Mendekatkan Pelayanan Masyarakat Di Tingkat Lokal. *Jurnal Borneo Administrator*, Vol. 13(1): 1-20
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Indonesia